

PENGAKUAN PENDAPATAN PADA KONTRAK KONSTRUKSI CV. PUTRI PAPUA

REVENUE RECOGNITION IN CV. PUTRI PAPUA CONSTRUCTION CONTRACTS

Aprilia G S Mussa¹, Pitter Leiwakabessy², Selpina Iek³

^{1,2,3}Politeknik Saint Paul Sorong

¹gloryamussa@gmail.com, ²leiwakabessypitter@gmail.com, ³Selpinaiek686@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan pendapatan pada Kontrak konstruksi di CV. Putri Papua, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan PSAK 115. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Putri Papua telah menerapkan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan konstruksi, sejalan dengan ketentuan PSAK 115. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan manual, dan ketidakpastian pembayaran dari pelanggan. Oleh karena itu, peningkatan sistem akuntansi dan pelatihan SDM menjadi penting untuk menunjang akurasi pengakuan pendapatan.

Kata Kunci: Pengakuan Pendapatan, PSAK 115, Jasa Konstruksi

Abstract

This study aims to analyze revenue recognition on construction contracts at CV. Putri Papua and to evaluate its compliance with PSAK 115. The research uses a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that CV. Putri Papua has applied the percentage-of-completion method for recognizing construction revenue, in accordance with PSAK 115 standards. However, several challenges were identified, such as limited human resources, manual recording systems, and uncertainty of customer payments. Therefore, improving accountin systems and providing staff training are crucial to support accurate revenue recognition.

Keywords: Revenue Recognition, PSAK 115, Construction Services

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang kian berkembang pesat, sektor jasa konstruksi memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu elemen krusial dalam sektor ini adalah bagaimana perusahaan jasa konstruksi mengakui pendapatan secara tepat dan akurat, agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pengakuan pendapatan merupakan bagian dari prinsip akuntansi yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan, dan dalam konteks jasa konstruksi, proses ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan tahapan pekerjaan, durasi proyek, serta penyesuaian biaya. Proses pengakuan pendapatan yang tepat dapat

membantu perusahaan dalam mengelola arus kas, merencanakan investasi, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik.

Permasalahan yang muncul dalam praktiknya adalah masih banyak perusahaan konstruksi, terutama skala kecil dan menengah, yang belum menerapkan standar akuntansi secara optimal, termasuk dalam hal pengakuan pendapatan. CV. Putri Papua sebagai salah satu perusahaan jasa konstruksi lokal di Papua, menghadapi tantangan dalam menentukan waktu dan jumlah pendapatan yang harus diakui, khususnya terkait proyek jangka panjang. Ketidaksesuaian antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diakui dapat menimbulkan kesalahan pelaporan yang berdampak pada pengambilan keputusan manajemen serta kepercayaan investor atau mitra kerja. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi CV. Putri Papua untuk menerapkan metode pengakuan pendapatan yang sejalan dengan standar akuntansi yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar.

Dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, terutama PSAK 115 tentang *Kontrak Konstruksi*, dijelaskan mengatur bagaimana entitas (biasanya kontraktor) Menyatakan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan dari proyek pembangunan. dengan tujuan Menyediakan pedoman dalam pelaporan keuangan kontrak konstruksi agar informasi yang disajikan relevan, andal, dan mencerminkan kinerja aktual proyek. PSAK 115 menekankan bahwa pendapatan konstruksi tidak diakui sekaligus, melainkan bertahap berdasarkan progres aktual proyek, sehingga mencerminkan kinerja nyata di periode berjalan. (DSAK IAI, 2017, hlm. 3). Penerapan metode ini tidak hanya akan meningkatkan akurasi laporan keuangan, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih solid di antara semua pihak yang terlibat, termasuk para investor dan mitra kerja, yang semakin mencari transparansi dalam praktik bisnis. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan PSAK 115 secara efektif akan mampu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih unggul dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar. Implementasi yang tepat dari standar ini juga memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan dalam permintaan pasar, sehingga dapat mengoptimalkan strategi penjualan dan pemasaran mereka.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara teori akuntansi yang mengatur prinsip dan metode pengakuan pendapatan (misalnya pendekatan persentase penyelesaian atau metode kontrak selesai) dengan praktik yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan jasa konstruksi seperti CV. Putri Papua. Gap ini muncul akibat keterbatasan Sumber daya manusia yang mengerti tentang standar akuntansi terbaru, rendahnya kemampuan sistem informasi akuntansi yang mendukung, serta budaya pencatatan yang lebih berorientasi pada cash basis daripada accrual basis, sebagaimana disyaratkan dalam standar akuntansi

2. TEORI/METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 34 yang berubah menjadi PSAK No 115 sejak tanggal 1 Januari 2024, merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap kontrak dengan pelanggan termasuk kontrak konstruksi, baik bagi kontraktor utama maupun subkontraktor. Standar ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan bertujuan agar laporan keuangan dari perusahaan jasa konstruksi menyajikan informasi yang relevan, andal, dan mencerminkan kinerja riil dari proyek yang sedang berjalan. Menurut DSAK IAI (2017) dalam buku *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 115*, kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset atau sekumpulan aset yang saling berhubungan, seperti jalan, jembatan, bangunan, atau saluran irigasi. PSAK 115 juga mengatur pengakuan pendapatan dan beban selama masa proyek berlangsung. PSAK 115 memperkenalkan dua metode utama dalam pengakuan pendapatan dan biaya pada proyek konstruksi :

a. Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage of Completion Method*), Metode ini digunakan jika

hasil kontrak dapat diestimasi dengan andal. Pendapatan dan biaya proyek diakui sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Ini artinya, meskipun proyek belum selesai, perusahaan tetap mengakui sebagian pendapatan berdasarkan progres aktual proyek.

- b. Metode Kontrak Selesai (*Completed Contract Method*), Metode ini hanya digunakan jika hasil proyek *tidak dapat diestimasi secara andal*. Dalam metode ini, pendapatan dan biaya baru diakui saat proyek telah selesai secara menyeluruh. Namun, PSAK 115 menekankan bahwa **metode persentase penyelesaian lebih disarankan**, karena lebih sesuai dengan prinsip akuntansi akrual dan memberikan gambaran yang lebih tepat atas kinerja perusahaan selama proyek berjalan.

Tujuan utama dari PSAK 115 adalah agar laporan keuangan adalah Menyajikan pendapatan, beban, dan laba yang sesuai dengan kemajuan proyek, Memberikan transparansi kepada pengguna laporan, baik itu investor, kreditur, maupun mitra kerja dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data keuangan yang andal.

Menurut PSAK 115, Pendapatan adalah nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima oleh kontraktor atas pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk lump sum, cost plus, atau unit price, sepanjang memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Ini penting karena pengakuan pendapatan harus mencerminkan realitas ekonomi yang terjadi.

Zaki Baridwan (2004:18) Menyatakan bahwa, Pendapatan adalah arus masuk bruto aktiva yang timbul dari aktivitas normal perusahaan, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari kontribusi pemilik.

Suwardjono (2016:375) menjelaskan bahwa, Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan bukan berasal dari kontribusi pemilik.

Mulyadi (2001:10) mendefinisikan Pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pemilik.

Pengakuan pendapatan merupakan proses penentuan kapan pendapatan diakui dalam laporan keuangan. Menurut Rudianto (2012:213), pendapatan diakui ketika terjadi peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode yang berasal dari aktivitas normal perusahaan dan yang menyebabkan kenaikan ekuitas. Dalam konteks akuntansi konstruksi, pengakuan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh penjualan produk, tetapi oleh progres pekerjaan yang telah diselesaikan dan disetujui oleh pelanggan. Untuk memudahkan kita memahami apa itu pengakuan pendapatan maka dapat dilihat dari definisi-definisi yang dikutip dari buku, antara lain sebagai berikut :

1. Rudianto. (2012) dalam buku *Pengantar Akuntansi*, Halaman 215 menjelaskan bahwa Pengakuan pendapatan adalah pengakuan atas pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan yang diakui ketika manfaat ekonomi diperkirakan akan mengalir ke perusahaan dan dapat diukur secara andal.
2. Baridwan, Z. (2004) dalam bukunya *Intermediate Accounting* (Edisi Kedelapan) menjelaskan bahwa Pengakuan pendapatan harus dilakukan pada saat pendapatan tersebut sudah dihasilkan dan dapat diukur secara andal. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan berkaitan erat dengan prinsip kesesuaian antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
3. Sugiri, S. (2015) dalam buku *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Halaman 72 menulis bahwa Pendapatan diakui pada saat terjadi peningkatan manfaat ekonomi yang dapat diukur dengan andal, yang berasal dari transaksi yang menyebabkan bertambahnya aktiva atau berkurangnya kewajiban.
4. Suwardjono. (2016) buku *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan* (Edisi Ketiga),

Halaman 391 menjelaskan bahwa Pengakuan pendapatan dilakukan apabila ada kepastian bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pendapatan tersebut akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Hal ini mengacu pada prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku dalam PSAK.

5. Mulyadi. (2001) buku *Akuntansi Biaya*, Halaman 23 menyebutkan bahwa Pendapatan diakui pada saat terjadinya perubahan dalam keadaan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kekayaan perusahaan, yang dapat diukur dengan andal.
6. Dalam PSAK 115 (1 Januari 2024) mengatur tentang pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi terdapat dua metode utama untuk mengakui pendapatan dan beban yaitu : Metode Presentase Penyelesaian (Percentage of completion method) dan metode kontrak selesai. Metode presentase penyelesaian menyatakan bahwa pendapatan dan beban diakui sejalan dengan kemajuan proyek. Rumus pengakuan pendapatan adalah :

$$\text{Total Nilai Kontrak} \times \frac{\text{Biaya yang telah dikeluarkan}}{\text{Total Estimasi Biaya}}$$

Menurut Mulyadi (2016:8), biaya adalah *pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu*. Biaya berkaitan erat dengan aktivitas produksi dan operasional perusahaan, di mana pengorbanan tersebut diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Penulis mengkaji beberapa pengertian biaya agar dapat dipahami oleh siapapun yang membaca penelitian ini antara lain, Hansen dan Mowen (2009:40) Dalam buku *Akuntansi Manajerial*, Hansen dan Mowen menyatakan Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada masa kini atau masa depan. Definisi ini menekankan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan harus memiliki tujuan ekonomis, yaitu memberikan manfaat yang dapat diukur secara finansial. Dalam konteks akuntansi manajerial, pemahaman terhadap konsep biaya ini sangat penting untuk menganalisis efisiensi, efektivitas, serta profitabilitas suatu aktivitas atau proyek bisnis.

Menurut Supriyono, 2014:13 dalam bukunya *Akuntansi Biaya*, biaya merupakan elemen penting yang harus diperhitungkan dalam setiap aktivitas ekonomi perusahaan. Ia mendefinisikan biaya sebagai Harga yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diukur dalam satuan uang sesuai dengan nilai tukar pada saat transaksi terjadi. Definisi ini menekankan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh barang atau jasa harus dicatat dan diukur secara objektif dalam bentuk nilai moneter. Menurut Carter dan Usry (2002:30) dalam buku *Akuntansi Biaya* edisi ke-14, biaya dijelaskan sebagai berikut, Biaya adalah nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa. Definisi ini menunjukkan bahwa biaya merupakan segala bentuk pengorbanan ekonomis, baik dalam bentuk kas maupun sumber daya lainnya, yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Dalam praktik akuntansi, pengertian ini menjadi dasar dalam perhitungan harga pokok, evaluasi efisiensi operasional, serta penentuan harga jual.

Dalam praktiknya, jasa konstruksi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu :

1. Proyek berbasis kontrak, yang artinya pekerjaan dilakukan sesuai perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa.
2. Bersifat unik dan tidak berulang, karena setiap proyek konstruksi memiliki spesifikasi, lokasi, dan kebutuhan yang berbeda.
3. Waktu pelaksanaan relatif panjang, sehingga berpengaruh pada metode akuntansi seperti pengakuan pendapatan dan biaya (misalnya metode persentase penyelesaian).
4. Mengandung risiko tinggi, baik dari sisi teknis, keuangan, maupun administratif.

Oleh karena itu, perusahaan jasa konstruksi harus memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang mampu merepresentasikan kondisi keuangan secara akurat selama proyek berlangsung, termasuk dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Biaya jasa konstruksi adalah seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan konstruksi untuk menyelesaikan suatu proyek konstruksi, yang meliputi biaya langsung maupun tidak langsung, dan dicatat sesuai prinsip akuntansi. Biaya ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan harga pokok proyek, penilaian kinerja, serta pengakuan pendapatan.

Dalam akuntansi, biaya jasa konstruksi dicatat berdasarkan prinsip akuntansi akrual, di mana biaya diakui saat terjadinya, bukan saat kas. Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi, karena berperan dalam pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung pertumbuhan sektor lainnya. Secara umum, jasa konstruksi mencakup seluruh kegiatan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pembongkaran bangunan atau struktur lain yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk pihak pengguna jasa berdasarkan kontrak kerja tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah Layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Sementara itu dalam literatur akuntansi, Sukirno (2014:179) dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Pembangunan* menjelaskan bahwa Jasa konstruksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan bangunan dan sarana fisik lain, baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta, dan memiliki karakteristik jangka waktu pelaksanaan, tahapan pekerjaan, serta pengakuan pendapatan yang berbeda dari sektor lainnya dibayarkan. Biaya ini nantinya akan dibandingkan dengan pendapatan proyek untuk menentukan laba atau rugi proyek secara periodik.

Menurut PSAK 115 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi, entitas harus mengakui pendapatan dan biaya kontrak berdasarkan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan, sepanjang hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi dengan andal (DSAK IAI, 2024:PSAK 115).

Commanditaire Vennootschap (CV), yaitu bentuk persekutuan komanditer dalam hukum perusahaan di Indonesia. CV merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana ada perbedaan tanggung jawab antar pemilik modal. Merujuk pada definisi tersebut, ada beberapa definisi lainnya menurut para ahli yaitu :

1. Munir Fuadi (2003) *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah suatu bentuk persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang bertindak sebagai sekutu aktif (komplementer), dan satu atau lebih sebagai sekutu pasif (komanditer) yang hanya menyeter modal dan tidak ikut campur dalam pengurusan perusahaan.
2. Soeharto (2001) *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan bentuk persekutuan perdata yang sebagian anggota bertanggung jawab penuh terhadap utang-utang persekutuan dan sebagian lainnya hanya menanamkan modal tanpa ikut mengurus jalannya perusahaan.
3. Sutedi (2012) *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah suatu bentuk persekutuan yang tidak berbadan hukum, yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, dengan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan perusahaan.

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak aktif (*komplementer*) dan bertanggung jawab penuh atas operasional dan utang perusahaan, sedangkan pihak lainnya hanya menyeter modal (*komanditer*) dan tidak ikut dalam pengelolaan usaha. CV tidak berbadan hukum, namun sah di mata hukum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 19 sampai Pasal 21.

Pasal 19 menyatakan bahwa Suatu persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang, yang artinya CV adalah bentuk kerja sama usaha antara pihak yang aktif menjalankan usaha (sekutu komplementer) dan pihak yang

hanya menyetorkan modal (sekutu komanditer), dimana sekutu aktif menanggung utang sepenuhnya. Pasal 20 menyatakan bahwa Persekutuan komanditer dapat didirikan untuk waktu tertentu atau untuk waktu tak tertentu yang berarti CV bisa dibuat dengan jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun) atau tidak terbatas waktu. Pasal 21 menyatakan bahwa Nama dari persekutuan komanditer hanya boleh memuat nama dari sekutu-sekutu yang bertanggung jawab tidak terbatas. Jika nama dari seorang sekutu yang hanya memasukkan uang saja dimuat juga dalam nama persekutuan, maka sekutu ini bertanggung jawab untuk seluruhnya seperti seorang sekutu yang bertanggung jawab tidak terbatas, yang artinya Nama CV tidak boleh mencantumkan nama sekutu pasif. Jika mencantumkan, maka ia akan dianggap bertanggung jawab penuh sebagaimana sekutu aktif.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, serta manajemen internal. Perusahaan jasa konstruksi memiliki karakteristik operasional yang unik, seperti durasi proyek yang panjang, sistem kontrak, dan pengakuan pendapatan berdasarkan progres pekerjaan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan pada sektor ini tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan sektor lainnya.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas pengakuan pendapatan pada proyek konstruksi berdasarkan PSAK 115 dengan berbagai pendekatan dan objek kajian. Beberapa di antaranya dilakukan pada perusahaan konstruksi skala besar, terutama perusahaan BUMN, serta berfokus pada aspek formal dan teknis penerapan metode pengakuan pendapatan.

Penelitian oleh Dessy Ariska (2015), misalnya, meneliti pengakuan pendapatan pada PT. Istaka Karya dan menjelaskan secara mendalam mengenai penerapan PSAK 34, namun hanya terbatas pada konteks perusahaan BUMN. Riana Puspita (2016) memberikan contoh aplikatif pengukuran pendapatan, tetapi tidak membandingkan metode lain dalam pengakuan pendapatan. Sementara itu, Andi Rahmat (2017) lebih fokus pada metode persentase penyelesaian tanpa membahas metode alternatif atau praktik aktual di lapangan. Siti Nurbaya (2018) melakukan evaluasi terhadap pengakuan pendapatan berdasarkan progres proyek, namun tidak menyentuh aspek dampaknya terhadap laporan keuangan. Sedangkan Iwan Santosa (2019) meneliti implementasi PSAK 34 di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, namun terlalu berfokus pada aspek formal pelaporan, sehingga tidak mengulas praktik akuntansi yang terjadi secara operasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan cara mengkaji :

1. Penerapan PSAK 115 dalam pengakuan pendapatan jasa konstruksi di perusahaan swasta skala kecil/menengah, yaitu CV. Putri Papua.
2. Analisis praktis atas pencatatan, pengakuan, dan pelaporan pendapatan konstruksi berdasarkan kondisi nyata perusahaan.
3. Evaluasi terhadap dampak metode pengakuan pendapatan terhadap laporan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bentuk studi empiris di sektor UKM konstruksi, yang selama ini masih jarang menjadi objek penelitian dalam konteks akuntansi konstruksi berbasis PSAK 115.

Table 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul	Pembahasan	Kelebihan	Kekurangan
1	Dessy ariska (2015)	Pengakuan Pendapatan Jasa	Analisis pengakuan pendapatan	Penjelasan mendalam mengenai	Terbatas hanya pada satu

		Konstruksi pada PT. Istaka Karya	berdasarkan PSAK 34	penerapan PSAK 34	perusahaan BUMN
2	Riana puspita (2016)	Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Proyek Konstruksi Berdasarkan PSAK 115	Studi kasus pengakuan dan pengukuran pendapatan proyek di perusahaan jasa konstruksi	Memberikan contoh aplikatif pengukuran pendapata	Tidak membandingkan dengan metode lain
3	Andi Rahmat (2017)	Analisis Penerapan PSAK 34 pada Proyek Konstruksi	Kajian terhadap penerapan metode persentase penyelesaian dalam proyek jangka panjang	Pembahasan teknis cukup rinci	Terbatas hanya pada metode persentase penyelesaian
4	Siti Nurbaya (2018)	Evaluasi Pengakuan Pendapatan Konstruksi Berdasarkan PSAK 34	Evaluasi pengakuan pendapatan berdasarkan progress proyek	Fokus evaluasi aktual terhadap praktik perusahaan	Tidak membahas implikasi akuntansi terhadap laporan keuangan
5	Iwan Santosa (2019)	Implementasi PSAK 34 di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	Implementasi nyata PSAK 34 dalam perusahaan konstruksi BUMN	Data empiris dari perusahaan besar	Terlalu fokus pada aspek formal laporan keuangan

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di CV Putri Papua yang berlokasi di Jalan Birolo, Kecamatan Kohoin, Kabupaten Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan . Kegiatan penelitian berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Dimulai pada bulan Maret hingga akhir bulan Mei tahun 2025. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mempelajari dan memahami penerapan prinsip pengakuan pendapatan yang berhubungan dengan biaya jasa pembangunan di CV. Putri Papua. Data kualitatif merupakan data yang memiliki sifat deskriptif. Data yang peneliti gunakan juga terdapat angka, namun tujuan utamanya adalah memahami makna atau konteks di balik angka tersebut, bukan untuk generalisasi statistik seperti pada penelitian kuantitatif. Data ini diperoleh melalui analisis dokumen.

Data yang peneliti gunakan adalah Data sekunder, diperoleh dari berbagai dokumen relevan, misalnya laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan kontrak proyek. dokumen ini nantinya dianalisis untuk memahami bagaimana penerapan prinsip pengakuan pendapatan diterapkan pada penerapan

nyata. Serta literatur terkait seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang penerapan prinsip pengakuan pendapatan, akuntansi konstruksi, dan PSAK 115.

Teknik memperoleh data yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan cara Studi Dokumentasi. Dalam tahapan ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis beragam dokumen yang relevan, misalnya laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan kontrak proyek. Metode ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip pengakuan pendapatan pada penerapan nyata.

Peneliti menggunakan teknik untuk menganalisis data sebagai berikut :

1. Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik dilakukan untuk menemukan tema-tema utama yang timbul dari penelitian ini. Pendekatan ini digunakan dalam rangka menelusuri keterkaitan antara tema yang ditemukan. Pendekatan tematik bertujuan untuk menyampaikan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik penerapan prinsip pengakuan pendapatan di CV. Putri Papua dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan dalam penerapan prinsip pengakuan pendapatan Untuk menentukan tema-tema penting yang muncul dari studi ini. Pendekatan ini digunakan dalam rangka menelusuri keterkaitan antara tema yang ditemukan. Pendekatan tematik bertujuan untuk memberi gambaran yang lebih terperinci tentang praktik penerapan prinsip pengakuan pendapatan di CV. Putri Papua serta elemen-elemen yang mempengaruhi keputusan dalam penerapan prinsip pengakuan pendapatan.

2. Penyajian data

Dari analisis data, hasilnya akan disampaikan melalui bentuk uraian naratif yang menggambarkan secara jelas untuk memperlancar pemahaman. pihak peneliti akan menyusun laporan yang mencakup temuan utama, analisis, dan interpretasi data. Penyajian data bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan teratur, agar dapat dipahami oleh pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

3. PEMBAHASAN

CV. Putri Papua menerapkan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) dalam pengakuan pendapatan untuk setiap proyek konstruksi. Pendekatan ini sesuai dengan PSAK 115 yang menyatakan bahwa apabila hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi dengan andal, maka pendapatan dan biaya harus diakui sesuai dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan. Hal ini ditunjukkan melalui jurnal yang mencatat pendapatan konstruksi dan biaya kontrak secara berkala berdasarkan progres pekerjaan aktual. Namun, CV. Putri Papua hanya mencatat langsung kedalam neraca. Untuk itu, penulis membuat jurnal sebagai pencatatan tambahan berdasarkan data proyek yang diberikan.

Setiap proyek memiliki pola pengakuan yang menunjukkan adanya estimasi progres dan penyesuaian terhadap biaya aktual yang dikeluarkan. Sebagai contoh, pada proyek P001 dan P002, pengakuan pendapatan meningkat secara proporsional dengan biaya yang telah dikeluarkan, mencerminkan pendekatan realistis dan sesuai standar. Pendapatan yang diakui tidak menunggu kas diterima, namun berdasarkan pekerjaan yang sudah diselesaikan, menunjukkan penerapan basis akrual.

Penerapan pengakuan pendapatan oleh CV. Putri Papua secara umum sudah sesuai dengan PSAK 115, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penilaian Kemajuan Proyek : CV. Putri Papua menggunakan pendekatan biaya aktual terhadap estimasi biaya total (*cost-to-cost method*) sebagai dasar menghitung persentase penyelesaian proyek.
2. Pengakuan Pendapatan dan Biaya : Diakui secara simultan dan sistematis sesuai tingkat penyelesaian proyek, sebagaimana diatur dalam PSAK 115.
3. Pencatatan Tagihan & Piutang : Pendapatan yang lebih besar dari tagihan dicatat sebagai aset kontrak (*under billing*), dan sebaliknya sebagai kewajiban kontrak (*over billing*) — sesuai PSAK 115.

Beberapa kendala yang dihadapi CV. Putri Papua dalam menerapkan PSAK 115 secara optimal antara lain:

1. Estimasi Biaya Total yang Kurang Akurat : Beberapa proyek menunjukkan deviasi antara biaya aktual dan estimasi awal, yang berpotensi menurunkan keandalan persentase penyelesaian.
2. Keterlambatan Tagihan dan Pembayaran : Tagihan yang belum tersinkron dengan progres actual menyebabkan pencatatan over/under billing yang signifikan, yang dapat mengaburkan posisi keuangan sesungguhnya.
3. Kurangnya Sistem Pencatatan Real-Time : Proses akuntansi masih dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan jurnal yang mencerminkan progres proyek terkini.

Meski demikian, perusahaan tetap menunjukkan niat dan upaya untuk menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual dan menghitung pendapatan secara progresif, sejalan dengan PSAK 115.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi mengenai pengakuan pendapatan pada biaya jasa konstruksi di CV. Putri Papua, dapat disimpulkan bahwa :

1. CV. Putri Papua memanfaatkan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method) dalam pengakuan pendapatannya. Cara yang dipakai ini dianggap sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi karena pendapatan diakui sejalan dengan progres pekerjaan yang diselesaikan.
2. Pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres fisik proyek yang diukur melalui laporan kemajuan pekerjaan. Hal ini membantu perusahaan dalam mencatat pendapatan secara proporsional dan lebih mencerminkan kondisi keuangan yang aktual.
3. Dalam penerapannya, perusahaan belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 115 tentang pengakuan pendapatan dengan kontrak dari pelanggan. Beberapa komponen, seperti pengakuan beban dan penyajian laporan keuangan proyek, masih dilakukan secara sederhana tanpa dokumentasi yang lengkap atau pemisahan antara proyek yang satu dengan yang lain.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi menjadi kendala utama dalam penerapan akuntansi konstruksi yang sesuai standar. Meskipun demikian, pihak manajemen menyadari pentingnya pencatatan keuangan yang lebih akurat dan sedang berupaya meningkatkan sistem administrasi keuangan.

Dengan demikian, penerapan metode persentase penyelesaian dalam pengakuan pendapatan oleh CV. Putri Papua merupakan langkah yang tepat dan relevan dengan karakteristik usaha jasa konstruksi. Namun, kesesuaian penerapan tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penyesuaian dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, khususnya PSAK No. 115, agar laporan keuangan yang disusun dapat memberikan informasi yang andal dan relevan bagi pihak internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus B. Siswanto & M. Afif Salim 2019. Manajemen Proyek Konstruksi. Institute of Development University.
- [2] Al Tafakur La Ode, Muhammad Syarif, Haerul Purnama, Masdiana 2023. Manajemen Proyek Konstruksi.
- [3] Baridwan, Z. 2004. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- [4] Buku Manajemen Proyek Konstruksi oleh Wulfram I. Ervianto. E-Library.
- [5] Buku Saku Tukang Bangunan Edisi Ke-1. Scribd.
- [6] Carter, W. K., & Usry, M. F. 2002. Akuntansi Biaya-*Cost Accounting*. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.

- [7] Dwirandra, A. A. N. B., Rahyuda, I. K., & Suwendra, I. W. 2020. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja dan Pengendalian Internal terhadap Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan pada Proyek Konstruksi. Denpasar: Universitas Udayana.
- [8] Ervianto, I.W. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi. Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Penerbit Widina Repository.
- [9] Ferdinand Fassa. Manajemen Logistik Konstruksi. Google Books.
- [10] Hafnidar. Manajemen Proyek Konstruksi.
- [11] Hafnidar. Manajemen Proyek Konstruksi. Institute of Development University.
- [12] Hansen, D. R., & Mowen, M. M. 2009. Akuntansi Manajerial. Edisi 8, Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] Moh Nur Sholeh & Shifa Fauziyah. Pengadaan Material Proyek Engineering Procurement Construction.
- [14] Mulyadi. 2001. Akuntansi Biaya. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Panjaitan, Nismah; Suranto; Nurmaidah. Manajemen Proyek: Strategi Organisasi dan Pemilihan Proyek. USU Press, 2023. USU Press.
- [16] Rudianto. 2012. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- [17] Sugiri, S. 2015. Akuntansi Keuangan Lanjutan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [18] Sukrino. 2014. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [19] Supriyono. 2014. Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Perhitungan Harga Pokok. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- [20] Suwardjono. 2016. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.